



Media: BERNAS

Hari: Rabu

Tanggal: 11 Desember 2013

Halaman: 2

Pemkot Gelar Kegiatan Hari Difabel

UMBULHARJO -- Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja akan menggelar kegiatan sebagai wujud kesetaraan persepsi bagi penyandang disabilitas atau kaum difabel. Kegiatan ini diadakan dalam rangka International Disability Day atau Hari Penyandang Cacat Internasional.

Ludiono Raharjo selaku Kabid Komisi Olahraga Khusus Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI) Kota Jogja mengatakan, kegiatan yang bertema "Jogja Istimewa, Menuju Kota yang Ramah, Peduli dan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas" ini, sebagai bentuk implementasi Perda Nomor 4 tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Sesuai amanat Perda tersebut, Pemkot ingin mengajak seluruh lapisan masyarakat Kota Jogja menyamakan persepsi terhadap kaum difabel. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat diharapkan mau hidup harmonis dan berdampingan serta menyadari hak yang sama kaum difabel.

"Nantinya kelompok difabel dengan kelompok reguler bisa menyatu dalam kegiatan itu. Rencananya akan digelar beberapa acara untuk memeriahkan Peringatan Hari Disabilitas Internasional

2013 ini," kata Ludiono dalam jumpa pers, Selasa (10/12) kemarin.

Rangkaian kegiatan ini dimulai Sabtu (14/12) mendatang dengan gelaran lomba lukis di Pendapa Balaikota Timoho. Lomba yang akan diikuti berbagai kelompok usia ini akan mengangkat tema Penyandang Disabilitas di Kota Jogja dan Kepedulian Terhadap Penyandang Disabilitas.

Ludiono menyebutkan rangkaian kegiatan Hari Penyandang Cacat Internasional tersebut terlaksana berkat kerja sama antara Pemkot Jogja, FORMI Kota Jogja dan Center for Improving Qualified Activity in Live of People with Disabilities (Ciqal) Kota Jogja. Selain lomba lukis akan digelar senam sehat, jalan sehat inklusif dan beberapa acara hiburan. "Untuk pendaftarannya dibuka mulai 5-11 Desember 2013 di FORMI Kota Jogja," tambahnya.

Data tak valid

Meski menggelar rangkaian kegiatan untuk menghemati Hari Penyandang Cacat Internasional, Arni Surwaati dari Ciqal menyebutkan, implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2012 masih jauh dari harapan kaum difabel. Advokasi untuk pemenuhan hak kaum difabel tidak bisa dilakukan pemerintah semata-mata.

"Pemberdayaan penyandang disabilitas tidak bergantung pada pemerintah saja. Lembaga swasta juga harus intensif dalam upaya tersebut, sehingga dapat mempercepat tercapainya peningkatan kesejahteraan kelompok difabel," jelasnya.

Selain itu, masalah pendataan penyandang disabilitas khusus untuk wilayah DIY juga belum optimal. Masih ada perbedaan persepsi, siapa yang dimaksud penyandang difabel.

Sejauh ini, kata Arni, belum ada data valid untuk mengetahui penyandang disabilitas di DIY. Prinsipnya sesuai asumsi dari data PBB bahwa rata-rata penyandang disabilitas 15 persen dari jumlah penduduk dalam satu wilayah.

"Yang menjadi hambatan saat ini kevalidan data penyandang disabilitas. Perlu ada persamaan persepsi, siapa sih kelompok difabel yang dimaksud," kata dia.

Berdasarkan data Word Report On Disability tahun 2011, penyandang disabilitas di DIY diperkirakan berjumlah 526.961 dari total jumlah penduduk sebanyak 3.413.071 jiwa. Seharusnya terbagi di Kota Jogja sebanyak 66.021 orang, Kabupaten Sleman 150.870 orang, Kabupaten Bantul 138.189

orang, Kabupaten Gunungkidul 101.307 orang dan Kabupaten Kulonprogo berjumlah 70.573 orang penyandang disabilitas.

"Pada prinsipnya pendataan penyandang disabilitas itu harus memiliki persepsi yang sama sehingga data tersebut bisa lebih valid," kata Arni.

Aktivistis disabilitas Maria Muslimatun kepada *Bernas Jogja* mengatakan, kepedulian pemerintah terhadap kaum difabel selama ini masih hanya sebatas di ujung bibir saja. Pegawai di lembaga Foundation for Self reliance of Disabled people (Fosdis) ini menunjuk sedikit fakta yang ada.

"Misalnya, di halte Trans Jogja, ramp untuk difabel masih belum sesuai dengan fungsinya. Terkadang dibuat nabrak polusi atau beton tanpa sadar sebenarnya apakah kita bisa memakainya. Kemudian di gedung-gedung instansi pemerintah, kita kesulitan untuk mengakses karena tidak ada fasilitas untuk penyandang cacat," ujarnya.

Maria menganggap, masyarakat masih kerap memandang kaum penyandang cacat sebagai kelompok kelas dua dan hanya perlu dikasihani. Persepsi seperti ini masih susah dihapus sehingga kerap menimbulkan diskriminasi di kehidupan bermasyarakat.

(ros)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Kantor Kesatuan Bangsa	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 12 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005